



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, maka visi didalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kabupaten Halmahera Utara serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”.

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

1. ***Pemerintahan yang baik***, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya



diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat. Pemerintah yang baik juga diwujudkan dengan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Pemerintah fokus pada program meningkatkan dan menciptakan jiwa kewirausahaan untuk mengurangi kemiskinan. Didukung dengan infrastruktur dasar yang memadai. Sehingga hasil perkebunan dapat langsung didistribusikan dari desa ke pelanggan. Dengan memperbaiki jalan produksi. Masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diperoleh sebagai hasil dari perwujudan pemerintahan yang baik.

2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggung jawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

5.2 Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara



Tahun 2016-2021, sebagai berikut: Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian visi. Selain itu, misi juga merupakan suatu yang dituju serta dapat pula memberikan petunjuk untuk pencapaian visi. Dengan demikian, guna mewujudkan visi tersebut maka ada empat misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih

Pemerintahan yang bersih, profesional, transparansi dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah selaku abdi negara dan abdi masyarakat memahami serta menyadari setiap tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan prima yang bermuara pada terwujudnya kepuasan masyarakat.

Aspiratif, partisipatif, dan transparan mempunyai makna bahwa pemerintah tanggap dan peka terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat sehingga proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan stakeholders dan selanjutnya diikuti keterbukaan/transparan dalam implementasinya melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis website. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis Teknologi Informasi (TI) menjadi faktor pendukung dan penentu bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk dapat mengakses berbagai kebijakan pembangunan daerah yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila kehidupan masyarakat berada dalam suasana aman, damai, dan tenteram. Oleh karena itu, penegakkan supremasi hukum dan peraturan perundang-undangan mutlak dilakukan. Dengan demikian akan tumbuh kehidupan masyarakat yang saling menghargai, toleransi, dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Meminimalisir perbedaan pendapat antar umat beragama.



Menjaga ketenteraman dan terciptanya ketertiban umum, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting, karena merupakan kegiatan yang saling bersinergis dan berkesinambungan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik perlu dilakukan sehingga masyarakat mengerti akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga Negara. Dengan demikian diharapkan akan timbul kesadaran hukum masyarakat sehingga benturan dan gesekan di tengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan, melalui pemanfaatan teknologi modern serta meningkatkan aksesibilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan kebangsaan serta cinta tanah air sehingga mampu menghadapi tantangan dan dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan serta perkembangan kemajuan jaman.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk penambahan jumlah dokter spesialis dan alat-alat kesehatan modern pada RSUD, selain untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Halmaheara Utara dan daerah sekitarnya juga untuk kepentingan peningkatan status RSUD Tobelo dari tipe C menjadi tipe B, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi angka rujukan pasien yang harus berobat ke Rumah Sakit di luar Halmaheara Utara, sehingga menimbulkan biaya pengobatan yang cukup besar. Perbaikan dan peningkatan Puskesmas yang tersebar di kecamatan-kecamatan mutlak dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal misalnya dari rawat jalan menjadi rawat inap. Dengan demikian di setiap Puskesmas harus memiliki tenaga dokter.

Tersedianya sarana dan prasarana publik, seperti prasarana jalan, jembatan, pelabuhan laut maupun udara, irigasi, air minum, sanitasi yang layak serta perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian



pemanfaatan ruang. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan maupun pelabuhan akan dapat memberikan akses terhadap wilayah-wilayah terisolir sehingga mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Kabupaten Halmahera Utara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, maka pembangunan sarana pelabuhan laut merupakan kebutuhan mendesak/penting masyarakat yang mesti diprioritaskan. Ketersediaan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan.

Pembangunan Sarana dan prasarana pedesaan dan perkotaan meliputi pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyediaan ruang terbuka hijau. Serta dengan menyediakan dokumen perencanaan ruang sebagai pedoman dalam pembangunan yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi Seluruh Warga Masyarakat Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Wilayah Halmahera Utara yang didiami oleh berbagai etnis dijadikan sebagai modal utama untuk terciptanya kesetaraan dan persamaan hak dalam mengembangkan kehidupan baik di bidang pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, agama dll. Perilaku primordial karena merasa diri sebagai anak daerah sehingga menuntut hak untuk lebih didahulukan/diprioritaskan harus dihilangkan serta mewujudkan kerukunan antar dan inter umat beragama.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara, yaitu melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan serta pariwisata sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan tanpa harus mengabaikan sektor-



sektor usaha lain yang potensial bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat. Pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam bagi kepentingan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan dan mengutamakan aspek kelestarian ekosistem lingkungan dan berbasis mitigasi bencana untuk peningkatan perekonomian masyarakat harus yang bertumpu pada pembangunan yang berkelanjutan.

Penciptaan jiwa kewirausahaan yaitu dengan menyediakan berbagai sarana pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengembangan ketrampilan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang usaha baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur dan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah termasuk Halmahera Utara. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan akan dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sentra-sentra ekonomi antara lain pembangunan pasar lokal/tradisional, penyediaan bantuan keuangan yang bersifat produktif serta pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah terisolir untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5.3 Tujuan Dan Sasaran

Dalam mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di point 5.2, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi, maka perumusan tujuan dan sasaran dirancang terukur dan sistematis, yang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :



**Tabel 5.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD**

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmaheha Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan										
Misi kesatu : Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih										
		Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih								
		Sasaran 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	1. Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	CC	CC	B	B	B	B
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat		68.5	69	71	73	75	75
			4. Presentase PD yang menggunakan aplikasi berbasis IT	23.4%	31.91%	36.17%	46.81%	57.45%	65.96%	65.96%
		Sasaran 2. Meningkatnya penegakan hukum	1. Angka Kriminalitas yang Tertangani	6.69	5.85	5.01	4.17	3.33	2.5	2.5
		Sasaran 3. Terwujudnya Penanganan Bencana	1. Presentase kejadian bencana yang ditangani kurang dari 24 jam	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100%	100%
Misi kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar										
		Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
		Sasaran 1. Terwujudnya Akses pelayanan bidang kesehatan	1. Presentase balita kurang gizi	5.4	5.34	5.28	5.22	5.16	5.1	5.1
			2. Presentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	65	71	77	83	89	95	95



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Perubahan
KABUPATEN HALMAHEHA UTARA 2016-2021

		Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kesehatan	1. Angka Kematian Bayi	12.53	12.03	11.54	11.05	10.56	10.07	10.07
			2. Angka Kematian Ibu	369	338	301	257	206	150	150
			3. Angka Usia Harapan Hidup	68.77	69.17	69.58	69.98	70.39	70.8	70.8
			4. Indeks Pembangunan Manusia	65.4	66.52	67.64	68.76	69.88	71	71
		Tujuan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pendidikan								
		Sasaran 1. Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs	98.87	99.04	99.2	99.37	99.53	99.7	99.7
			2. Melanjutkan Sekolah: SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	52.55	61.83	71.11	80.4	89.68	98.96	98.96
			3. Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah	76.09	78.18	80.26	82.34	84.43	86.51	86.51
			4. Angka Melek Huruf	97.62	98.04	98.47	98.89	99.32	99.75	99.75
			5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8.90	8.92	8.94	8.96	8.98	9.00	9.00
		Tujuan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang infrastruktur dasar								
		Sasaran 1. Meningkatnya infrastruktur dasar	1. Presentase Rumah Tangga berakses air bersih	47.01	49.61	52.21	54.8	57.4	60	60



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Perubahan
KABUPATEN HALMAHEIRA UTARA 2016-2021

			2. Presentase Rumah Tinggal bersanitasi	25.83	39	44.25	49.5	54.75	60	60
			3. Drainase dalam kondisi baik	21.91	22.395	24	25.04	26.09	27.13	27.13
			4. Rasio jaringan irigasi	4,59 M/Ha	14.57	24.56	34.55	44.54	54.53	54.53
			5. Presentase desa yang dialiri listrik	94.92%	95.54%	96.15%	96.77%	97.38%	100%	100%
		Sasaran 2. Meningkatkan aksesibilitas transportasi	1. Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	60 Kasus	54 Kasus	48 Kasus	42 Kasus	36 Kasus	30 Kasus	30 Kasus
			2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan kecepatan minimal 40 km/jam)	49.28	54.86	60.44	66.02	71.6	77.18	77.18
			3. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	72.09	80.61	81.63	82.65	83.67	84.69	84.69
		Sasaran 3. Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan ruang / lingkungan	1. Rasio bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	0.04	0.19	0.34	0.49	0.64	0.5	0.5
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73.8	75.3	77.7	79.8	81.4	82.9	82.9
Misi ketiga : Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan antara seluruh masyarakat										
		Tujuan 1. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek								



		kehidupan antara seluruh masyarakat								
		Sasaran 1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1. Partisipasi angkatan kerja perempuan	44.82%	44.94%	45.17%	45.52%	45.98%	46.44%	46.44%
Misi keempat : Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan										
		Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan								
		Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pertanian / perkebunan.	1. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.8
			2. Produktivitas padi dan perkebunan atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton)	32.70	34.33	36.04	37.84	39.73	41.71	41.71
		Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi perikanan.	1. Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4.2%	4.36%	4.52%	4.68%	4.84%	5%	5%
			2. Produksi Perikanan (Ton)	16,000	16,212	17,409	18,606	19,803	21,000	21,000
		Sasaran 3. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pertambangan	1. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
		Sasaran 4. Terwujudnya	1. Kunjungan Wisata	35.200	40.230	45.260	50.290	55.320	65.350	65.350



		peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi pariwisata.								
		Tujuan 2. Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan								
		Sasaran 1. Meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM	1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	182	202	218	233	248	253	253
			2. Presentase Pertumbuhan Industri	11.11%	15.00%	16.00%	17.00%	18.00%	19.00%	19.00%
			3. Usaha Mikro dan Kecil	92%	93.18%	94.36%	95.54%	96.72%	97.9%	97.9%
		Tujuan 3. Mengurangi Angka Kemiskinan								
		Sasaran 1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59%	62%	65%	68%	71%	75%	75%
			2. Rasio Ketergantungan	43.32%	43.25%	43.18%	43.10%	43.05%	43.00%	43.00%
			3. Angka Kemiskinan	4.19%	4.10%	4.05%	4.01%	3.95%	3.91%	3.91%
			4. Gini Ratio	0.283	0.268	0.258	0.256	0.254	0.252	0.252
			5. Laju Inflasi	4,70	4,20	4,20	3,61	3,40	3,21	3,21